

BUDAYA SPIRITUAL DALAM KONTEKS ERA GLOBALISASI^{*)}

Oleh : Mohammad Damami

Globalisasi

Istilah yang dipilih dalam tulisan ini adalah dari kata “globalisasi”, bukan “globalisme”. Dalam kata “globalisasi” terkandung pengertian *proses yang sedang berjalan*, yaitu proses menuju hal-hal yang bersifat menyebar ke seluruh wilayah planet bumi (*globe* = bola/peta planet bumi). Karena muata dalam kata “globalisasi” itu adalah proses, maka istilah “globalisasi” menjadi terbuka untuk diartikan secara berbeda-beda (Azizy, 2003 : 18). Belum ada pengertian yang baku. Karena itu, para akademisi ketika berhadapan dengan maslaah globalisasi tersebut menjadi banyak yang skeptis, atau ragu-ragu (*skeptical* = bersifat ragu-ragu). Sebab, sampai saat ini tanda-tanda yang menunjukkan adanya keutuhan format apa yang disebut “globalisasi” tersebut tampaknya belum ditemukan (Steger, 2005 : 31). Ketika orang berbicara tentang “globalisasi”, maka berseliweranlah istilah-istilah yang belum memiliki pengertian yang baku dan mendapat penjelasan yang mapan, misalnya istilah-istilah “homogenisasi (penyeragaman)”, “hegomoni”, “imperialisasi”, “universalisasi”, “pasar bebas”, dan sebagainya.

Dari segi sejarahnya, gejala globalisasi (yang maunya akan diarahkan menjadi ideologi ‘globalisme’), bermula ditemukan dalam bahasan-bahasan di jurnal-jurnal bisnis pada akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an. Dalam bahasan-bahasan tersebut digambarkan adanya perkembangan besar dan penaklukan pasar yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional (Petras, 2003 : 177). Tentu saja yang dimaksud dengan “perusahaan multinasional” di sini adalah perusahaan-perusahaan raksasa di negara-negara industri raksasa, seperti yang ada di Benua Eropa dan Amerika Utara. Sementara itu, yang dimaksud dengan “pasar yang ditaklukkan” adalah rakyat dan negara-negara yang sedang berkembang, apalagi rakyat dan negara yang terbelakang.

^{*)} Makalah disampaikan pada kegiatan Sarasehan Budaya Spiritual Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tema *Budaya Spiritual dan Moralitas Bangsa*, yang diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, pada tanggal 27-28 Maret 2012, bertempat di University Hotel Yogyakarta.

Dengan memperhahtikan sejarah timbulnya gejala globalisasi di atas, dapat diambil pengertian bahwa pada dasarnya globalisasi adalah masalah *ekonomi*, bukan yanglain, seperti politik, kebudayaan, pertahanan, dan sebagainya. Kalau dilihat dari kacamata kepengalaman kesejarahan bangsa Indonesia, dapat dikatakan bahwa globalisasi ini merupakan wajah lain dari kolonialisasi. Dalam periode kolonialisasi tersebut, kedatangan orang-orang Eropa (dalam hal ini Belanda, Portugis, Inggris) di Indonesia didorong oleh kebutuhan mencari *bahan dagangan*, terutama rempah-rempah, untuk dijual di Eropa. Sebab, rempah-rempah tersebut sangat dibutuhkan di Eropa pada waktu itu, sementara itu penghasil terbesar bahan tersebut adalah di Nusantara. Karena itu para pedagang Eropa tersebut berlomba-lomba untuk memperebutkan bahan dagangan berupa rempah-rempah tersebut untuk dapat meraih keuntungan dagang yang sebesar-besarnya. Dalam kesejarahannya selanjutnya, para pedagang Eropa tersebut berusaha memperkuat diri lewat pendirian dan pengokohan organisasi perdagangannya berupa kongsi-kongsi dagang. Sebut saja, misalnya, Belanda mendirikan ***Vencenigde oost Indische Compagnie (VOC)*** pada tahun 1602. Bukan itu saja, bahkan VOC ini mendapat mandat dari Kerajaan Belanda dengan diberi beberapa kewenangan, antara lain diberi hak untuk monopoli dalam perdagangan, diberi hak memiliki tentara sendiri, diberi hak untuk menyelenggarakan pengadilan, dan diberi hak untuk melakukan perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di wilayah kekuasaan monopoli perdagangannya (Badriks, 1993 ; 184). Sebagai kelanjutannya, para pedagang kolonial tersebut tidak puas hanya sekedar kuat dalam perdagangannya saja, khususnya dalam monopoli bahan-bahan dagangan yang diperlukannya, melainkan berlanjut ingin menguasai secara penuh wilayah-wilayah yang diperlukan. Maka timbullah proses-prose imperialisasi (*imperare* = menguasai) dan tertanamlah ideologi imperialisme.

Dari sudut kacamata kepengalaman kesejarahan bangsa Indonesia, globalisasi pada hakikatnya adalah wajah terselubung dari kelanjutan imperialisasi di atas. Sebabnya adalah karena globalisasi wajahnya juga mula-mula ekonomi lalu diikuti oleh wajah-wajah lain nuansanya juga “ingin menguasai”.

Berbeda dengan cara pandang di atas, rata-rata literatur Barat dalam membahas tentang globalisasi ini sering hanya memusatkan diri pada masalah ekonomi semata, tidak juga menyinggung tentang “nafsu ingin menguasai” di atas. Nafsu ingin menguasai tersebut, dalam bahasan-bahasan yang terdapat dalam literatur-literatur tersebut seolah-olah disembunyikan atau disamarkan untuk menutup-nutupi kedoknya. Yang ditonjol-

tonjolkan, bahkan pada abad ke-19 pernah dipopulerkan, bahwa negar-negara Barat, dalam hal ini Amerika Serikat dan Inggris Raya, adalah negara-negara yang melakukan modernisasi dan “pemeradaban” bagi semua bangsa, sekalipun berjalan secara evolusioner (Steger, 2005 : 20). Dengan demikian seolah-olah ada kesan, bahwa rakyat dan negara-negara di luar Amerika Serikat dan Inggris Raya adalah rakyat dan negara yang perlu dibuat beradab dan modern. Seolah-oleh yang punya monopoli beradab dan modern “hanyalah” Amerika Serikat dan Inggris Raya. Globalisasi yang ditiup-tiupkan dari Barat dewasa ini barangkali tidak dapat dilepaskan dari sisa-sisa (atau mungkin karena latennya) dari anggapan yang berpangkal pada ingin memodernkan dan ingin membuat beradab di atas.

Kembali sebentar tentang imperialisasi di atas. Dalam kesejarahannya, proses-proses imperialisasi mulai mendapat pilar pengokoh adalah dengan munculnya “revolusi industri” yang berlangsung antara 1750-1840-an (Badrika, 1993 ; 27). Dalam periode ini banyak ditemukan teknologi, terutama dalam dunia kelistrikan dan mesin. Sebagai kelanjutannya, maka di kota-kota besar di Eropa muncul pabrik-pabrik yang menghasilkan kebutuhan hidup secara berlimpah. Demikian juga nanti terjadi di Amerika Serikat. Setelah masuk ke abad ke-20, perkembangan industrialisasi di Barat dan Amerika Serikat, termasuk Jepang, telah berjalan sedemikian rupa. Negara-negara industri ini memerlukan pasar untuk menjual hasil industri mereka. Kalau dulu zaman kolonialisasi mereka membutuhkan bahan dagangan, kini yang lebih menonjol adalah mencari bahan baku industri dan pemasarannya. Jika dua faktor ini stabil, maka industri mereka berjalan dengan baik. Karena itu lalu terjadi lagi “penjajahan ekonomi nasional” oleh kekuatan “ekonomi global”. Paul Hirst dan Grahame Thompson menggambarkan hal tersebut dengan menyatakan sebagai berikut, “salah satu akibat penting dari konsep globalisasi adalah dilumpuhkannya strategi reformasi radikal di tingkat nasional, karena strategi ekonomi nasional dianggap tidak mungkin dapat dijalankan, karena akan harus berhadapan dengan penilaian dan sanksi pasar internasional” (Hirst, 2001 : 2).

Untuk menyembunyikan kedok “penguasaan penuh” dalam konsep globalisasi di atas, maka dibuatlah penghalusan-penghalusan sebutan (eufemisme) yang ujung-ujungnya adalah untuk memperkuat “penguasaan penuh” di atas. Ungkapan eufemisme yang dimaksud misalnya sebut “pemerintahan yang bersih” adalah eufemisme dari berkurangnya campur tangan negara terhadap pasar (yang bisa dimainkan oleh iklan, promosi, dan sebagainya). “pasar bebas” adalah eufemisme dari pengurangan hak

dan kebebasan dasar manusia (akibat ditelikung oleh tekanan pasar yang direkayasa; sebut “kepentingan nasional” pada hakikatnya adalah untuk menyelubungi kepentingan-kepentingan khusus yang tersembunyi, dan sebagainya (Marcuse, 2003 : 6-7).

Menurut A. Qodri Azizy, globalisasi memiliki 2 (dua) wajah, yaitu selaku “alat” dan bisa juga menjadi “ideologi” (Azizy, 2003 : 22). Dua-duanya dipakai dalam percaturan dunia zaman kini, terutama oleh negara-negara besar dan maju. Sementara itu planet bumi kebanyakan masih terdiri dari rakyat dan negara yang belum maju dan yang menuju kemajuan. Negara-negara maju tentu saja memiliki kesiapan atau paling tidak lebih memiliki persiapan yang lebih dulu, sedangkan negara yang belum dan yang sedang menuju maju persiapannya masaih jauh dari cukup. Karena itu wajar kalau negara-negara yang belum dan yang sedang menuju maju ini menjadi “makanan empuk” bagi negara-negara maju. Apalagi, sekali lagi menurut A. Qodri Azizy, kata kunci globalisasi adalah “kompetisi” (persaingan). Mana mungkin seimbang negara belum dan sedang menuju maju katika akan bersaing dengan negara yang sudah maju (Azizy, 2003 : 26-28).

Apa yang disebut “penguasaan penuh” dalam globalisasi di atas, yang semula bermula dari aspek ekonomi, namun akhirnya mengimbas pada bidang-bidang lain, seperti politik, kebudayaan, pandangan hidup, gaya hidup, dan sebagainya. Rantai imbas ini masih terus bertambah kepanjangannya, termasuk nanti dalam bidang agama dan kehidupan spiritual di seluruh bangsa di dunia ini. Imbas ini begitu kuatnya disebabkan adanya daya dukung dari kemajuan teknologi komunikasi, yang didukung oleh makin gencarnya intervensi politik, militer, dan makin sistematisnya telikungan perjanjian-perjanjian internasional. Biasanya negara-negara kecil, yang belum maju, dan yang setengah maju, kalah dalam pergumulan perumusan isi perjanjian-perjanjian internasional tersebut. Andaikata berhasil ikut menyumbang gagasan, kalau gagasan tersebut dianggap “tidak menguntungkan” pihak negara-negara yang maju, maka isi perjanjian tersebut tenggelam tidak dijalankan atau tidak ditaati oleh negara-negara maju tersebut.

Budaya Spiritual

Di Indonesia dikenal 3 (tiga) istilah yang menyangkut dunia keyakinan, yaitu istilah “agama”, “kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa”, dan “religi setempat” (Damami, 2011 ; 276-277). Agama yang legal (dalam arti disahkan oleh Undang-undang negara Republik Indonesia) ada 6 (enam), yaitu Hindu, Budha, Islam, Protestan, Katolik, dan Konghucu (Penetapan Presiden Ri No. 1 Tahun 1965, Pasal 1 dan Penjelasannya).

Sedangkan “kepercayaan terhadap- Tuhan Yang Maha Esa” diakui legal sejak ditetapkan dalam Tap MPR Nomor IV/MPR/1973 (Maret 1973). Sementara itu apa yang disebut “religi setempat” adalah keyakinan lokal yang diperkuat oleh realitas antropologis yang ada dalam masyarakat yang masih dimiliki oleh suku-suku yang berada di bumi Nusantara.

Budaya spiritual yang dimaksud dalam tulisan ini difokuskan pada istilah “kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa”. Di sini akan diperjelas dan dipertegas lebih dahulu apa yang dimaksud dengan budaya spiritual dalam arti kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu. Menurut hasil penelitian penulis, secara garis besar apa yang disebut “kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa” tersebut adalah sebuah bangunan *keyakinan mistis* (Damami, 2011 : 66-67). Sekalipun penulis lain ada yang memecah pengertian dengan mengatakan bahwa “kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa” juga merupakan paham metafisika, etika, dan sains *occulte* (Rasjidi, 1977), namun kecenderungan terbesar adalah berupa bangunan keyakinan mistik di atas.

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sejak keluarnya Tap MPR Nomor IV/MPR/1973 di atas, maka kedudukan konstitusionalnya menjadi sangat kuat. Dengan demikian, sekalipun sosok bangunannya lebih bersifat keyakinan mistik, dan juga sekalipun setiap agama besar yang diakui di Indonesia ini juga memiliki ajaran mistik masing-masing, kedudukan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selama belum ada perubahan konstitusional, maka seharusnya memiliki kesadaran peran yang sama tingginya dengan agama-agama yang ada.

Dalam kesejarahannya, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat dikatakan sebagai sebuah produk *lokal genius* (kearifan lokal) yang terutama sekte-sektenya banyak muncul di Jawa (seluruh sekte kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak kurang dari 247 buah). Proses pembentukan mpada setiap sekte berbeda-beda dan bermotif yang berbeda-beda pula. Karena itu muatan sekte kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini boleh dikatakan sebagai sebuah mozaik yang berwarna-warna. Setiap sekte memiliki nasib naik turun sendiri-sendiri, sesuai dengan kekuatan/kelenturan ajaran dalam menghadapi tuntunan dan tantangan zaman, kesinambungan kepemimpinan, dan kerapihan organisasi sekte yang bersangkutan.

Terlepas dari macamnya sekte seperti telah disebutkan di atas, ada sekte dari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini yang jangkauan pengaruhnya tidak saja dalam negeri, melainkan sampai ke mancanegara, misalnya sekte Susila Budi Darma (SUBUD). Bukan itu saja, bahkan ajarannya ada yang diangkat menjadi bahan studi

dalam bidang kesehatan jiwa, misalnya disertasi yang disusun oleh Dokter Summantri Harjoprakosa untuk meraih gelar Doktor dalam Ilmu Jiwa dengan judul **Indonesisch Mensbeeld Als Basis Ener Psychotherapic** (1956). Itupun dipertahankan dalam ujian disertasi di Rajks Univesitcit, Leiden, Belanda. Kerena itu segera dikenal di kancah dunia internasional. Karena itu peran-peran sosial secara konkret dari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa masih perlu terus digali dan ditemukan, bukan saja untuk manusia di tingkat lokal, melainkan juga yang menjangkau di tingkat global.

Tantangan dan Peluang

Bagi budaya spiritual semacam kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, masalah-masalah yang ada dalam zaman atau era globalisasi dapat ditangkap sebagai tantangan dan sekaligus peluang untuk berkesempatan berperan di dalamnya. Masalah-lasalah dalam zaman globalisasi tersebut tampak akan berdampak negatif, bahkan destruktif terhadap hidup manusia, kalau tidak dikendalikan dan diatasi dengan segera secara sistemik, bertahap, dan terus-menerus. Di antara masalah-masalah utama dalam zaman globalisasi tersebut sebagaimana tertulis di bawah ini.

Pertama, rapuhnya mental akibat nafsu sistem pasar kapitalis. Menurut Dr. H. J. Witteveen, mantan Menteri Keuangan Belanda dan Direktur Pelaksana *linternational Monetary Fund* (IMF), yang menjadi karakteristik fuse pertumbuhan dalam sistem ekonomi zaman globalisasi ini adalah makin dominannya modal usaha dalam bentuk saham. Dalam sistem ekonomi seperti ini, peraihan tingkat nilai saham menjadi tujuan utama dalam manajemen sebagian besar perusahaan. Karena itu, pemegang saham, terutama pegang saham yang terbanyak, menjadi lebih berpengaruh dalam menentukan kebijakan perusahaan (Witteveen, 2004 : 79). Dari sinilah muncul suburnya mental untuk serba “meningkatkan keuntungan” sebagai tema sentralnya dan berdampak pengabdian tata moral. Persaingan jual beli harga saham menjadi pokok. Perusahaan yang memiliki harga saham yang lebih tinggi dan lebih banyak pemegang sahamnya dengan mudah dapat mengambil alih perusahaan yang memiliki harga saham yang lebih rendah. Di sinilah akan terjadi “mekanisme memperkuat diri sendiri” (Witteveen, 2004 : 80), dengan cara rakus (tamak) memakan pihak lain dengan sebanyak-banyaknya. Dalam kondisi persaingan ekonomi seperti ini, modal investasi akan ditarik ke dalam roda ekonomi yang paling dinamis, yang akhirnya menumbuhkan pertumbuhan yang sangat cepat (Witteveen, 2004 : 80). Di Indonesia, beberapa tahun terakhir ini, ditandai dengan merebaknya *minimarket*

yang menjadi satelit dari *supermarket* atau *hypermarket*. *Minimarket* ini mengepung toko-toko tradisional yang berkembang sesuai dengan perkembangan daya beli masyarakat sekitar. Dampak lain, misalnya, kini terkenal kecenderungan baru yang disebut "*money politic*" (politik uang), yaitu pengiringan pemilihan dalam sistem pemilihan umum dengan berbekal uang yang dibagi-bagikan. Dengan demikian, pemilihan dari peserta pemilihan kurang, bahkan boleh dikatakan tidak, didasarkan pada mutu atau kualitas seseorang calon pemimpin, melainkan karena sekedar utang budi akibat pemberian uang. Dampak lain dari kecenderungan serba ingin "meningkatkan keuntungan" saja ini adalah rapuhnya mental dalam setiap menghadapi realitas kekalahan. Misalnya, karena kalah dalam proses pemilihan kepala daerah (Pilkada), lalu menjadi stres mentalnya atau tidak secara sportif mengakui kekalahannya secara ksatria di forum umum. Dalam bahasa Witteveen, manusia zaman globalisasi sekarang ini adalah pencinta inovasi mesin pertumbuhan ekonomi, tetapi pada akhirnya dia sendiri justru kurang lebih terperangkap dalam mesin pertumbuhan ekonomi itu sendiri yang berideologi sistem pasar kapitalis (Witteveen, 2004 : 81). Kerapuhan mental seperti tergambar di atas pada akhirnya akan merambah dalam dunia politik, kebudayaan, karakter, pendidikan, dan sebagainya,

Kedua, melemahnyatata nilai sosial yang telah dibangun dalam kehidupan religius. Dengan mengutip pendapat dari Francis Fukuyama, Witteveen mengatakan bahwa sebenarnya tata nilai sosial yang dibangun lama dalam masyarakat mampu mendukung nilai ekonomi yang sedang diusahakan, bahkan nilai ekonomi dari tata nilai sosial semacam itu, karena besarnya, dapat diukur. Witteveen mengutip pendapat Francis Fukuyama tersebut sebagai berikut : "Kemampuan berasosiasi pada gilirannya tergantung sejauh mana komunitas berbagai norma dan nilai serta mampu menomorduakan kepentingan individu demi kepentingan kelompok yang lebih besar. Dari nilai-nilai bersama semacam itu lahirlah kepercayaan *trust*, pen, dan kepercayaan, seperti anda lihat, adalah nilai ekonomi yang besar dan dapat diukur." (Witteveen, 2004 : 104). Seperti diketahui masalah "*trust*" (kepercayaan) adalah nilai yang sangat dijaga dalam dunia perdagangan. Sementara itu *trust*, menurut Fukuyama yang dikutip oleh Witteveen di atas, justru mampu dibangun lewat memperpeka tata nilai sosial terhadap masyarakat. Jelasnya, makin tinggi rasa sosial terhadap masyarakat dipupuk, maka makin hebat pula *trust* masyarakat terhadap pemegang kendali ekonomi. Sayangnya, rasa sosial seperti ini tampak sangat merosot pada zaman globalisasi sekarang ini. Ini semua sebagai dampak langsung atau tidak langsung dari karakter ekonomi pasar kapitalis di atas. Kalau

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bercirikan menekankan sifat batin, menekankan kerohanian, menghargai keaslian (*local genius*), melestarikan geguyuban, dan menjunjung tinggi budi luhur sebagaimana yang disitir oleh Rahmat Subagya (Subagya, 1976), maka masalah melemahkan tata nilai sosial dalam zaman globalisasi ini dapat dijadikan tempat berperan untuk mengatasinya. Tentu saja masih perlu pencanggihan konsep teknisnya.

Ketiga, terjadinya degenerasi lingkungan alam. Pertumbuhan ekonomi yang memanfaatkan kemajuan teknologi canggih, tampaknya membawa dampak kerusakan lingkungan alam dalam skala luas. Dalam proses pertumbuhan ekonomi tersebut, terutama dalam perluasan dan pembesaran daya hasil industrialisasi dan juga intensifikasi transportasi serta komunikasi, ternyata secara konkret telah membawa kerusakan lingkungan alam yang hampir-hampir tak terkirakan. Misalnya saja, tanah dan air banyak mengalami proses peracunan. Sedangkan tanah dan air adalah modal kehidupan yang sangat vital bagi manusia generasi ke generasi. Demikian juga udara dan kestabilan salju di kutub utara (Aolaska) maupun Antartika (Witteveen, 2004 : 87-88). Di Indonesia sendiri saat ini sudah mulai dirasakan secara langsung adanya kerusakan-kerusakan lingkungan alam tersebut. Misalnya, kacaunya berlangsungnya musim kemarau dan musim penghujan, abrasi semakin meningkat yang menyebabkan hilangnya berbagai pulau, banyak badai dan gelombang laut, tingkat kepanasan global yang makin hari makin meningkat, dan sebagainya. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang sering disebut sangat menghargai keaslian lokal (*lokal genius*), kiranya dapat memformulasikan lebih canggih penanganan pelestarian lingkungan alam sesuai dengan pengalaman masyarakat yang sudah turun-temurun. Formatisasi konsep pelestarian alam dan lingkungannya tersebut tentu saja perlu disamakan dengan kemajuan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang sudah berkembang.

Keempat, kecenderungan adanya usaha homogenisasi (penyeragaman) budaya, gaya hidup, karakter, bahkan pandangan hidup. Menurut Roland Robertson, seperti yang dikutip oleh Manfred B. Steger, arus kultural global justru seringkali membangkitkan kesadaran bentuk budaya lokal. Paling tidak akan timbul apa yang disebut “globalisasi”, yaitu interaksi yang kompleks antara yang bersifat global dan yang bersifat lokal yang bercirikan peminjaman budaya *cultural borrowing* (Stager, 2005 : 56-57). Tumbuhnya kesadaran budaya global yang pada intinya membangunkan kesadaran membela diri *self defence* di kalangan pendukung budaya lokal yang dirasakan telag berjasa beratus-ratus

tahun lamanya. Mereka tersadar akan arti dan kebermanaknaan budaya lokal yang juga memiliki potensi positif bagi kehidupan masyarakat pendukungnya. Hal keempat ini barangkali perlu diterjemahkan ulang sedemikian rupa dikalangan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tentang bagaimana menghargai dan sekaligus mempertahankan bagian-bagian positif dari budaya lokal tersebut untuk dapat memosisikan budaya lokal pada tempat yang semestinya dan tetap dapat dimanfaatkan sifat-sifat positifnya.

Dengan melihat keempat masalah di atas secara lebih luas, maka terdapat peluang bagi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk melakukan 2 (dua) arah yang sama-sama pentingnya. *Arah pertama*, melakukan pembenahan terhadap hal-hal yang bersifat acara kerohanian yang bersifat ke dalam. Arah pertama ini menuntut adanya penguatan upacara penghayatan spiritual yang telah dibakukan oleh masing-masing skte. *Arah kedua*, yaitu yang bersifat ke luar, yakni ikut proaktif dalam ikut memecahkan masalah-masalah konkret yang sedang berlangsung, minimal di wilayah masing-masing. Arah kedua ini akan membuahkan *trus* (Keterpercayaan) masyarakat luas terhadap eksistensi dan juga kiprah dari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Budaya spiritual, dalam hal ini kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kiranya perlu memiliki andil dalam memperkokoh jiwa nasionalisme dalam menghadapi kepungan dan arus besar globalisasi lewat berbagai medianya. Sebab, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang jelas-jelas menyadari arti penting dan arti potensi dari kearifan lokal (*local genius*) di wilayah masing-masing.

DAFTAR BACAAN

- Azizy, A. Qodri
2003 *Melawan Globalisasi, Reinterpretasi Ajaran Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Badrika, I Wayan dan Setiadi Sulaeman
1993 *Sejarah Nasional dan Dunia*. Jilid I. Jakarta : Penerbit Erlangga
- 1993 *Sejarah Nasional dan Dunia*. Jilid II. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Damami, Mohammad

- 2011 *Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Paeriode 1973-7983 : Sebuah Sumbangan Pemahaman Tentang Proses Legalisasi Konstitusional Dalam Konteks Pluralitas Keberagaman di Indonesia.* Jakarta : Kementerian Agama republik Indonesia.
- Hirst, Paul dan Grahame Thompson
2001 *Globalisasi Adalah Mitos.* Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Lindholm, Tore, et al. (ed.)
2010 *Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan : Seberapa Jauh ?* Yogyakarta : Penerbit Kanisius.
- Marcusc, Peter
2003 “Bahasa Globalisasi”, Dalam : Sugihardjanto, Ali, dkk, *Globalisasi Perspektif Sosialis* (t.t.) : C-Books.
- Naisbitt, John dan Patricia Aburdene
1990 *Megatrends 2000, Sepuluh Arah baru Untuk Tahun 1990-an.* Jakarta : Binarupa Aksara.
- Petras, James
2003 “Negara Sebagai Agen Imperialisme”, Dalam : Sugihadjanto, Ali, dkk, *Globalisasi Perspektif Sosialis.* (t.t.) : C-Books.
- Rasjidi. H.M.
1977 *Islam Dan Kebatinan.* Jakarta : Penerbit “Bulan Bintang”.
- Steger. Manfred B
2005 *Globalisme, Bangkitnya Ideologi Pasar.* Jogjakarta : Lafald Pustaka.
- Subagya, Rahmad
1976 *Kepercayaan Kebatinan Kerohanian Kejiwaan dan Agama.* Yogyakarta : Penerbit Yayasan Kanisius.
- Witteveen, H.J.
2004 *Tasawuf in Action, Spiritualisasi Diri Di Dunia Yang tak Lagi Ramah.* Jakarta : Serambi.